

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep keamanan (*Security*) dalam kajian Hubungan Internasional mengalami perkembangan yang signifikan dengan berjalannya waktu dan perubahan dinamika sistem keamanan internasional. Menurut pemahaman realis klasik, keamanan yang berfokus pada ancaman militer terhadap kedaulatan negara merupakan bagian dari kerangka konsep keamanan tradisional. Perspektif ini berakar pada pemikiran realisme seperti Hobbes yang melihat sistem Internasional sebagai kondisi anarki (*state of nature*) yang mendorong negara untuk menitik beratkan fokus pada survival melalui kekuatan (*power*). Dalam kerangka ini, keamanan identik dengan kemampuan negara dalam mempertahankan diri dari agresi eksternal melalui instrumen militer (Buzan, 1991).

Pasca berakhirnya perang dingin (*cold war*), skala ancaman mengalami ekspansi yang signifikan. Dalam karyanya *People, states and Fear*, Buzan mengemukakan bahwa keamanan bukan hanya tentang kapabilitas militer, melainkan multidimensional lainnya yang mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan (Buzan, 1991). Oleh karena itu, Buzan membagi ancaman menjadi dua bagian yaitu, ancaman tradisional (*traditional security*) dan non-tradisional (*non-traditional security*).

Ancaman tradisional merujuk pada potensi konflik antarnegara, perlombaan senjata (*arms races*), serta agresi militer yang bersifat langsung dan terukur. Sementara itu, ancaman non-tradisional meliputi isu-isu seperti terorisme, perubahan iklim, kejahatan lintas negara, pandemi, serta kerentanan ekonomi global yang bersifat multidimensional dan sering kali melibatkan aktor non-negara (Buzan, 1991).

Pada konteks global transisi ini semakin relevan ketika ketergantungan antarnegara meningkat secara masif. Globalisasi tidak hanya mempercepat arus barang, jasa, dan informasi, tetapi juga memperluas penyebaran ancaman lintas batas. Contohnya, krisis finansial global, pandemi, maupun kejahatan siber (*cyber*) menunjukkan bahwa ancaman kontemporer tidak lagi mengenal batas geografisnya yang tegas. Hal ini menegaskan bahwa keamanan modern bersifat kompleks dan saling terkait, sehingga tidak dapat dipahami semata-mata melalui pendekatan militeristik.

Pada abad ke-21, banyak sekali terjadi perubahan mendasar dalam struktur geopolitik dan geostrategi dunia. Pada mulanya, awal konsentrasi pusat kekuatan ekonomi dan politik global berasal dari Euro-Atlantik namun secara perlahan bertransisi menuju kawasan Asia-Pasifik, yang dalam wacana termutakhirnya kerap dipahami ulang sebagai kawasan Indo-Pasifik. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi, namun juga memunculkan potensi kerentanan strategis yang kompleks. Dinamika keamanan kawasan tersebut dibentuk oleh proses transisi kekuasaan (*power transition*) serta meningkatnya strategis antara kekuatan hegemonik stabil, yaitu AS dan China (Degterev et al., 2021).

Dalam kerangka *offensive realism* yang dikutip John Mearsheimer, kebangkitan Tiongkok secara inheren akan memicu persaingan hegemonik yang tidak bisa dihindari. Ia berargumen bahwa peningkatan kekuatan Tiongkok tidak akan berlangsung secara damai, mengingat struktur sistem internasional yang anarkis untuk mendorong negara-negara besar untuk terus memaksimalkan kapabilitas relatifnya (Mearsheimer, 2001).

Di sisi lain, Graham Allison berargumen melalui tulisannya yang berjudul *the Thucydides trap* menunjukkan bahwa dalam sebagian besar kasus historis 12 dari 16 kemunculan kekuatan baru yang menantang dominasi lama kerap berakhir pada konflik bersenjata (*war*), sedangkan sisanya tidak bersenjata (*no war*) (Graham A., 2015). Ia menilai bahwa ketegangan struktural antara AS dan Republik Rakyat China memiliki potensi signifikan untuk berkembang menjadi konflik terbuka apabila tidak dikelola dengan hati-hati.

Thucydides Trap Case Studies

	Period		Ruling Power	Rising Power		Result
1	First half of 16th century		France	Hapsburgs		War
2	16th–17th centuries		Hapsburgs	Ottoman Empire		War
3	17th century		Hapsburgs	Sweden		War
4	17th century		Dutch Republic	England		War
5	Late 17th–early 18th centuries		France	Great Britain		War
6	Late 18th–early 19th centuries		United Kingdom	France		War
7	Mid-19th century		United Kingdom, France	Russia		War
8	19th century		France	Germany		War
9	Late 19th–early 20th centuries		Russia, China	Japan		War
10	Early 20th century		United Kingdom	United States		No war
11	Early 20th century		Russia, U.K., France	Germany		War
12	Mid-20th century		Soviet Union, U.K. France	Germany		War
13	Mid-20th century		United States	Japan		War
14	1970s–1980s		Soviet Union	Japan		No war
15	1940s–1980s		United States	Soviet Union		No war
16	1990s–present		United Kingdom, France	Germany		No war

Gambar 1 1 Thucydides Trap

Rivalitas antara kedua kekuatan besar tersebut tercermin dalam berbagai langkah Amerika Serikat menginisiasi strategi *Free and Open Indo-Pacific (FOIP)* serta memperkuat jejaring aliansi tradisionalnya. Di sisi lain, Republik Rakyat China menunjukkan sikap yang kian tegas melalui implementasi *Belt and Road Initiative (BRI)*, percepatan modernisasi militer Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), serta penguatan klaim teritorial historis yang bersifat ekspansif.

Sementara itu ditingkat regional, secara spesifik di wilayah Asia Tenggara, kompleksitas ancaman semakin nyata. Kawasan ini tidak hanya tempat kontestasi ajang kekuatan besar dalam kerangka geopolitik, tetapi juga menghadapi beragam ancaman non-tradisinoal yan bersifat transnasional. Disisi lain, ancaman tradisional masih tercermin dalam sengketa wilayah seperti laut China Selatan (LCS), peningkatan modernisasi militer, serta munculnya security dilemma antarnegara. Disatu sisi, kawasan ini juga rentan terhadap ancaman

non-tradisional seperti perompakan, perdagangan manusia, terorisme, hingga dampak perubahan iklim yang mengancam, negara kepulauan.

Data dari Stockholm International Peace Research Institute (Liang et al., 2025) menunjukkan bahwa sepanjang periode 2019-2014 terjadi peningkatan signifikansi dalam belanja militer negara-negara ASEAN. Misalnya, Indonesia telah menaikkan anggaran pertahanannya dari sekitar 7,6 miliar USD menjadi 9 miliar USD lebih. Vietnam dan Singapura juga memperlihatkan tren peningkatan yang konsisten, dengan Singapura tetap menjadi negara dengan pengeluaran militer terbesar di kawasan, melampaui 13 miliar USD per tahun. Sementara itu, Filipina mencatat kenaikan yang cukup tajam seiring dengan program modernisasi *Armed Forces of the Philippines (AFP)*. Pola ini mengindikasikan adanya akumulasi kekuatan militer di tingkat regional yang berpotensi berkembang menjadi kompetensi keamanan yang lebih intens.

Di luar dinamika yang dipengaruhi oleh blok barat, kawasan ini juga terus menghadapi peningkatan sikap tegas Republik Rakyat China di Laut China Selatan (LCS). Kalaim *Nine-Dash Line* secara langsung dan tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif (ZEE) beberapa negara ASEAN. Berbagai aktivitas dan manuver di wilayah sengketa tersebut tidak hanya memperdalam polarisasi, tetapi juga memperkuat munculnya *security dilemma* yang intens di antara negara-negara Asia Tenggara. Dalam situasi yang dipenuhi ketidakpastian dan potensi eskalasi konflik terbuka ini, upaya menjaga stabilitas kawasan, mempertahankan sentralitas ASEAN, serta memastikan keseimbangan kekuatan menjadi tantangan yang bersifat fundamental.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di persilangan dua samudra dan dua benua, Indonesia memegang kunci stabilitas maritim kawasan. Setidaknya empat dari sembilan *choke points* (titik sempit) perairan paling strategis di dunia berada di wilayah yurisdiksi Indonesia (Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar). Kondisi geografis ini membuat Indonesia tidak bisa mengisolasi diri dari dampak benturan strategis negara-negara besar. Eskalasi militerisasi yang terjadi persis di batas wilayah kedaulatan seperti ketegangan di Laut Natuna Utara menuntut postur pertahanan yang sangat tangguh dan strategi keamanan yang kalkulatif.

Secara strategis, sekitar 40% arus perdagangan dunia melintasi jalur laut (*Sea Lanes of Communication/SLOC*) di kawasan Indo-Pasifik, dengan porsi signifikan melewati perairan Indonesia. Salah satu titik paling krusial adalah Selat Malaka, yang setiap tahunnya dilalui

lebih dari 80.000 kapal dan berfungsi sebagai jalur utama distribusi energi dari Timur Tengah menuju Asia Timur. Selain itu, sekitar sepertiga perdagangan maritim global diperkirakan melewati kawasan Asia Tenggara, yang semakin menegaskan posisi wilayah Indonesia sebagai salah satu *chokepoint* terpenting dalam sistem perdagangan internasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa stabilitas maritim Indonesia memiliki dampak langsung terhadap keberlangsungan ekonomi global.

Terbukti Pada September 2023, kapal penjaga pantai China (*China Coast Guard*) kembali terdeteksi beroperasi di kawasan Laut Natuna Utara yang secara hukum internasional merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Insiden serupa telah berulang puluhan kali dalam beberapa tahun terakhir, namun respons Indonesia tetap konsisten yaitu penolakan tegas atas klaim tumpang tindih tanpa eskalasi militer terbuka, melainkan melalui jalur diplomatik dan penguatan patroli mandiri. Fenomena ini bukan kejadian terisolir melainkan cerminan nyata dari tekanan geopolitik yang dihadapi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang berada di persimpangan rivalitas kekuatan besar abad ke-21. Di saat yang bersamaan, Amerika Serikat melalui strategi *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP) terus mendorong negara-negara kawasan untuk memilih pihak, sementara China memperluas pengaruhnya melalui *Belt and Road Initiative* (BRI) dan modernisasi militer yang masif. Di tengah tekanan struktural ini, Indonesia justru memilih untuk tidak bergabung dalam aliansi militer mana pun sebuah pilihan strategis

Selain rivalitas antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok, dinamika keamanan Asia Tenggara juga dipengaruhi oleh kehadiran aktor-aktor strategis lain yang memiliki kepentingan signifikan di kawasan. Pembentukan pakta keamanan AUKUS (Australia, Inggris, dan Amerika Serikat) yang memungkinkan pengembangan kapal selam bertenaga nuklir bagi Australia menjadi isu penting bagi Indonesia (M Razi Rahman, 2025). Secara geografis, kedekatan Australia sebagai negara tetangga langsung meningkatkan sensitivitas terhadap potensi kapabilitas ofensif yang dapat melintasi Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Kondisi ini berpotensi memicu eskalasi militer yang tidak disengaja serta mendorong dinamika perlombaan senjata (*arms race*) di tingkat sub-kawasan.

Di sisi lain, keterlibatan aktif kekuatan menengah seperti India melalui kebijakan *Act East* serta Jepang melalui visi *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP) turut meningkatkan kepadatan kehadiran militer di titik-titik sempit (*choke points*) strategis Indonesia, seperti Selat Malaka dan Selat Sunda. Aktivitas kapal perang asing yang melakukan patroli secara rutin di

wilayah yurisdiksi Indonesia menuntut perumusan strategi pertahanan yang tidak hanya berfokus pada satu blok kekuatan, melainkan bersifat multidimensional dan adaptif.

Lebih lanjut, dinamika internal antarnegara ASEAN juga memperlihatkan adanya *security dilemma* yang bersifat tersembunyi. Modernisasi militer yang cukup signifikan oleh Singapura, Vietnam, dan Filipina, serta belum terselesaikannya sejumlah sengketa batas maritim termasuk di kawasan Laut Natuna Utara yang melibatkan Vietnam dan Malaysia menambah spektrum ancaman tradisional yang bersifat langsung.

Dalam mengkonstruksi strategi pertahanan yang tepat dan presisi, *decision maker* tidak boleh terbawa pada pola konseptual yang sederhana dalam menilai manuver AS dan China. Tantangan terbesarnya adalah kegagalan kognitif dalam membedakan antara tindakan yang didorong oleh niat defensif dengan tindakan yang didorong oleh niat offensif. Disini Robert Jarvis merombak asumsi rasionalitas dalam Psikologi kognitif, Jarvis menjelaskan bahwa para pemimpin negara menyaring informasi melalui keyakinan (*beliefs*) dan citra (*images*) yang telah terbentuk sebelumnya, dimana sering kali mendistorsi penilaian mereka melalui bias kognitif seperti *confirmation bias* dan *actor-observer disparity* (Jervis, 2017).

Bias Fundamental inilah yang menyebabkan suatu negara memandang tindakannya sendiri sebagai respon situasional yang murni defensif, sementara negara lain menilai tindakan negara sebagai bentuk refleksi dari niat agresif yang inheren (Jervis, 2017).

Baik Amerika Serikat atau China mereka tidak digerakan oleh insting defensif semata, melainkan keduanya memiliki ambisi dan rekam jejak terkait niat offensif, intervensi subversif, agresi teritorial dan ambisi revisionis terhadap Indonesia. Mempersepsikan niat offensif ini menjadi defensif adalah bentuk mispersepsi struktural yang berbahaya karena akan menjerumuskan Indonesia ke dalam perangkap *appeasement* (pembiaran) yang secara perlahan mengikis kedaulatan Nasional.

Penilaian terhadap AS sebagai sumber ancaman potensial tidak cukup didasarkan pada retorika kebijakan luar negeri AS (demokrasi) atau komitmen Aliansi. Analisis perlu melihat rekam jejak kebijakan luar negeri yang menunjukkan adanya penggunaan instrumen militer, intelejenn dan operasi rahasia untuk mempengaruhi stabilitas politik negara lain. Dalam konteks Indonesia, peristiwa sejarah selama perang dingin memperlihatkan adanya indikasi kemampuan sekaligus niat ofensif (*offensive capability* dan *aggressive intentions*) yang diarahkan pada kedaultan Indonesia.

Pada dekade 1950-an, Kebijakan luar negeri AS terhadap Indonesia dipengaruhi oleh strategi *Containment Policy* dan keyakinan terhadap *Domino Theory* (Zimmerman, 2018). Pemerintah Presiden Dwight D. Eisenhower, khususnya melalui Menteri Luar Negeri John F. Dulles dan Direktur CIA Allen Dulles, memandang meningkatnya pengaruh kelompok kiri serta kedekatan Presiden Soekarno dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai ancaman terhadap kepentingan strategis AS di Asia Tenggara. Persepsi tersebut mendorong AS untuk mengambil langkah-langkah intervensi guna membatasi pengaruh komunisme di Indonesia.

Bukti paling nyata dari kebijakan tersebut terlihat pada dukungan AS terhadap pemberontakan PRRI pada tahun 1958. Melalui operasi rahasia CIA, AS memberikan bantuan dalam bentuk pendanaan, logistik, persenjataan, pelatihan, serta dukungan intelejen kepada kelompok pemberontak. CIA juga mengoperasikan pesawat pembom B-26 Invader dan P-51 Mustang yang diterbangkan oleh pilot kontrak untuk mendukung operasi militer terhadap pemerintah Indonesia. Salah satu peristiwa yang paling dikenal adalah penangkapan pilot CIA Allen Lawrence Pope setelah pesawat yang diterbangkannya jatuh karena ditembak oleh TNI AU, yang kemudian menjadi bukti keterlibatan langsung AS dalam konflik tersebut.

Selain dukungan udara, AS juga menempatkan Armada ketujuh (7th Fleet) di sekitar perairan Asia Tenggara sebagai bentuk tekanan strategis selama berlangsungnya konflik. Intervensi tersebut meningkatkan eskalasi konflik domestik sehingga pemerintah Indonesia harus mengarahkan berbagai operasi militer, seperti Operasi Tegas, Operasi 17 Agustus, dan Operasi Merdeka. Lalu konflik ini mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan, meningkatnya inflasi, serta menimbulkan puluhan ribu korban jiwa dari pihak militer maupun masyarakat sipil.

Rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa AS tidak hanya memiliki kemampuan militer untuk menunjukkan kekuatan, tetapi juga memperlihatkan kecenderungan menggunakan instrumen militer dan operasi intelejen guna mempengaruhi perubahan politik di Indonesia. Dukungan terhadap kelompok pemberontakan, penyediaan persenjataan, operasi udara, dan keterlibatan agen CIA merupakan indikator nyata AS bersedia menggunakan instrumen apa saja guna memaksa dengan tujuan mencapai tujuan geopolitiknya.

Peristiwa tersebut berlanjut hingga tahun 1965-an, dimana Indonesia pada saat itu mengalami krisis. Dokumen-dokumen intelejen yang telah dikumpulkan menunjukkan bahwa AS bersama Inggris (sekutu) menjalankan berbagai bentuk operasi psikologis dan propaganda untuk mempengaruhi dinamika politik Indonesia. Beberapa Arsip juga mengindikasikan

adanya pemberian informasi mengenai tokoh-tokoh PKI kepada unsur militer Indonesia pada saat berlangsungnya konflik G-30S. Berbagai penelitian sejarah mengarahkan adanya dukungan barat kepada militer Indonesia menjadi bagian dari strategi Barat untuk mengurangi pengaruh komunisme di Indonesia sekaligus mengarahkan orientasi politik Indonesia agar lebih tajam dan sejalan bersama blok barat selama perang dingin.

Sejarah intervensi AS menjadi salah satu dasar yang menjelaskan mengapa pembuat kebijakan Indonesia memandang AS memiliki kapasitas dan sejarah penggunaan militer maupun operasi intelejen terhadap negara lain. Serta niat yang gigih AS untuk melakukan subversi keamanan jika posisinya sebagai negara hegemon merasa terancam atau kepentingan nasionalnya terganggu.

Selain AS, terdapat juga ancaman potensial nyata dari Republik Rakyat China pada masa perang dingin, dan tidak hanya dipahami sebagai peningkatan kapabilitas material, tetapi juga dari kebijakan luar negrinya yang mendorong penyebaran ideologi revolusioner ke negara-negara berkembang. Kedekatan China dan Indonesia pada awal 1960-an memberikan ruang bagi China untuk memperluas pengaruh politiknya di Indonesia, terbukti adanya hubungan erat antara Partai Komunis Indonesia dengan Partai Komunis China.

Salah satu indikasi nyata adalah ketika perdana Menteri Zhou Enlai memberikan bantuan sekitar 100.000 pucuk senjata kepada pemerintah Indonesia yang dikaitkan dengan gagasan angkatan kelima oleh PKI di luar dari struktur resmi angkatan bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Bagi pimpinan AD, rencana ini dinilai sebagai ancaman terhadap monopoli negara atas penggunaan kekuatan bersenjata dan berpotensi mengganggu stabilitas pertahanan nasional.

Sejak berakhirnya perang dingin, ancaman China masih tetap berlangsung secara nyata di era Xi Jinping. Dengan mengubah bentuk strategi yang digunakan untuk memperluas pengaruhnya. Di era ini, China menggunakan orientasi nasionalisme, ekspansionisme maritim, dan peningkatan pengaruh geopolitik (Hodzi & Chen, 2017). Pergesaran ini terlihat dari perubahan strategi luar negeri China yang meninggalkan prinsip *taoguang yanghui* (*hide your capabilities and bide your time*) menjadi pendekatan yang lebih asertif melalui Wolf Warrior Diplomacy dan kebijakan *fenfa youwei* (*striving for achivment*) (Callahan, 2016).

Perubahan tersebut berakar pada budaya strategis Tiongkok yang berakar pada konsep *tianxia* (Carrai, 2020). Dalam konsep ini, China dipandang sebagai pusat tatanan global yang memiliki posisi sentral dalam kawasan. Sejumlah akademisi berpendapat bahwa gagasan

tentang Great Rejuvenation of the Chinese Nation yang dikemukakan Xi Jinping adalah upaya untuk mengembalikan posisi strategis Tiongkok sebagai kekuatan utama di Asia, dan perspektif ini tercermin dalam kebijakan luar negeri Tiongkok yang semakin aktif menggunakan instrumen diplomasi, ekonomi, dan militer. Meskipun sistem internasional modern didasarkan pada prinsip kesetaraan kedaulatan seperti sistem Westphalia.

Ketika Xi Jinping menggaungkan "Mimpi Tiongkok" (*The Chinese Dream*) dan "Peremajaan Hebat Bangsa Tiongkok" (*Great Rejuvenation of the Chinese Nation*), visi tersebut secara intrinsik bersifat restorasionis dan revisionis (Carrai, 2020). Memulihkan martabat bangsa di mata Tiongkok identik dengan mengklaim kembali posisi sentral (hegemon) mereka di Asia Pasifik (Callahan, 2016). Tiongkok mempersepsikan diri mereka memiliki hak prerogatif moral dan strategis untuk mengatur negara-negara tetangganya. Mentalitas psikologis inilah yang membuat para pemimpin Tiongkok membenarkan penggunaan koersi ekonomi dan manuver angkatan laut terhadap negara-negara Asia Tenggara, karena mereka menganggap perairan sekitarnya sebagai halaman belakang hierarkis mereka yang sewajarnya tunduk pada keinginan pusat peradaban Tiongkok.

Klaim bahwa Nine-Dash Line berada di Laut Tiongkok Selatan adalah manifestasi paling jelas dari perubahan strategi tersebut. Klaim historis Tiongkok mencakup sebagian besar wilayah Laut Tiongkok Selatan, termasuk wilayah yang tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara (Latif & Shiddiqy, 2024). Dalam perkara Filipina melawan Tiongkok pada tahun 2016, Mahkamah Arbitrase Permanen (Mahkamah Arbitrase Permanen) menyatakan bahwa klaim historis tersebut tidak memiliki dasar hukum berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982. Meskipun demikian, Tiongkok mempertahankan klaimnya dengan mengklaim adanya hak perahu tradisional di kawasan tersebut.

Bagi Indonesia, klaim tersebut berkaitan langsung dengan hak berdaulat untuk mengelola sumber daya alam di ZEE Laut Natuna Utara. Sengketa ini tidak terkait dengan kepemilikan wilayah daratan sebaliknya, itu berkaitan dengan hak eksplorasi sumber daya perikanan, migas, dan yurisdiksi maritim yang diatur dalam UNCLOS 1982.

Dalam kenyataannya, Tiongkok lebih cenderung menggunakan strategi Grey Zone daripada melakukan konfrontasi militer terbuka. Strategi ini diterapkan melalui pengerahan kapal nelayan, China Coast Guard (CCG), dan People's Armed Forces Maritime Militia (PAFMM) secara berulang ke wilayah yang diklaim China tanpa menyebabkan konflik bersenjata langsung (Latif & Shiddiqy, 2024). Pada tahun 2016, 2019, 2020, 2021, dan 2024,

peristiwa serupa terjadi di sekitar Laut Natuna Utara. Karena kehadiran kapal-kapal tersebut sering disertai dengan tindakan yang mengganggu aktivitas aparat penegak hukum Indonesia, termasuk Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan TNI Angkatan Laut, tingkat ketegangan di wilayah tersebut meningkat.

Selain itu, China membangun pulau-pulau buatan dan fasilitas militer di beberapa bagian Kepulauan Spratly, seperti Mischief Reef dan Subi Reef. Infrastruktur ini dilengkapi dengan landasan udara, pelabuhan, sistem pertahanan udara, dan fasilitas logistik, yang meningkatkan kemampuan Tiongkok untuk proyeksi kekuatan di Laut Tiongkok Selatan.

kebijakan tersebut menunjukkan bahwa China tidak hanya memiliki *offensive capability* yang meningkat melalui modernisasi militer dan pembangunan pangkalan strategis, tetapi juga memperlihatkan *aggressive intentions* melalui klaim maritim sepihak, penggunaan strategi *grey zone*, serta pengerahan instrumen sipil dan militer untuk mempertahankan klaimnya. Rangkaian tindakan tersebut menjadi salah satu faktor yang membentuk persepsi Indonesia terhadap Tiongkok sebagai salah satu sumber ancaman potensial terhadap keamanan maritim dan stabilitas kawasan.

Fenomena-fenomena tersebut menunjukkan bahwa persepsi ancaman Indonesia bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh beragam aktor. Oleh karena itu, strategi non-alignment menjadi semakin relevan untuk dievaluasi menggunakan parameter analitis yang lebih luas dan komprehensif.

Dalam menghadapi fenomena tersebut, Indonesia secara konsisten mempertahankan prinsip politik luar negeri non-alignment. Doktrin yang diwariskan oleh para pendiri bangsa ini tercermin dalam pilihan strategi pertahanan yang bersifat non-aliansi. Berbeda dengan negara seperti Filipina atau Thailand yang memiliki perjanjian pertahanan timbal balik dengan Amerika Serikat, Indonesia secara konstitusional menegaskan sikap untuk tidak terikat dalam pakta militer pertahanan dengan kekuatan besar mana pun.

Postur pertahanan non-aliansi ini tidak mencerminkan sikap pasif, netralitas yang statis, ataupun prinsip menjaga jarak yang kaku. Sebaliknya, pendekatan tersebut merupakan langkah aktif untuk mempertahankan otonomi strategis (*strategic autonomy*). Dalam praktik kebijakan pertahanan kontemporer, Indonesia secara intensif menjalankan diplomasi pertahanan ke berbagai arah (*omni-directional defense diplomacy*) serta berupaya memperkuat arsitektur keamanan kawasan yang inklusif melalui mekanisme seperti ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM) dan ADMM-Plus.

Walaupun kebijakan non-aliansi telah lama menjadi pijakan utama, perubahan konfigurasi ancaman di kawasan Indo-Pasifik menuntut penelaahan akademik yang lebih mendalam. Pertanyaan kunci yang mengemuka adalah sejauh mana strategi pertahanan non-aliansi tersebut mampu secara efektif melindungi kepentingan nasional serta menjaga keseimbangan kawasan di tengah meningkatnya potensi konflik proksi.

Untuk menganalisis fenomena ini, perspektif realisme konvensional tentang *Balance of Power* (Perimbangan Kekuatan) yang digagas oleh Hans Morgenthau atau Kenneth Waltz tidak lagi cukup presisi. Teori *Balance of Power* mengasumsikan bahwa negara akan secara otomatis beraliansi untuk melawan negara yang memiliki akumulasi kapabilitas material (militer dan ekonomi) paling besar (Waltz, 1979). Jika logika ini murni digunakan, Indonesia seharusnya sudah membentuk atau bergabung dengan aliansi militer formal untuk membendung Tiongkok, mengingat disparitas kekuatan material yang sangat timpang. Namun, realitasnya Indonesia tidak melakukan hal tersebut.

Oleh karena itu, respons serta perumusan strategi pertahanan Indonesia lebih tepat dianalisis menggunakan kerangka *Balance of Threat* yang dikembangkan oleh Stephen M. Walt. Walt merevisi pendekatan *Balance of Power* dengan menegaskan bahwa negara pada dasarnya tidak menyeimbangkan diri terhadap besaran “kekuatan” (*power*), melainkan terhadap tingkat “ancaman” (*threat*) yang dirasakan (Walt, 1987).

Dalam karya klasiknya, *The Origins of Alliances*, Stephen M. Walt menegaskan bahwa negara pada dasarnya menyeimbangkan diri terhadap ancaman, bukan semata-mata terhadap kekuatan. Ia menjelaskan bahwa persepsi ancaman memiliki dimensi yang lebih kompleks dibandingkan sekadar distribusi kapabilitas material, karena turut dipengaruhi oleh faktor kedekatan geografis, kemampuan ofensif, serta niat strategis yang dipersepsikan (Walt, 1987). Dengan demikian, suatu negara dapat memilih untuk tidak melakukan penyeimbangan terhadap kekuatan terbesar apabila tidak dipandang sebagai ancaman yang bersifat langsung.

Dalam kerangka *Balance of Threat*, tingkat ancaman yang dipersepsikan oleh suatu negara dalam hal ini para pembuat kebijakan pertahanan di Indonesia ditentukan oleh interaksi empat variabel utama yang bersifat independen yaitu kekuatan Agregat (*Aggregate Power*), kedekatan geografis (*Geographic Proximity*), Kapabilitas Offensif (*Offensive Power*), dan Niat Agresif (*Aggressive Intentions*).

Penerapan kerangka ini memberikan dasar rasional atas pilihan Indonesia untuk mempertahankan postur pertahanan non-aliansi. Dalam perhitungan strategis Jakarta,

keterikatan pada satu blok militer justru berpotensi memperkuat persepsi “niat agresif” di mata pihak lain, yang pada akhirnya dapat menggeser posisi Indonesia dari aktor penyeimbang menjadi sasaran langsung. Dengan tidak bergabung dalam aliansi formal, Indonesia menerapkan mekanisme *soft-balancing* yang terukur: menjaga fleksibilitas dari komitmen militer yang mengikat, sekaligus terus meningkatkan kapabilitas penangkal (*deterrence*) secara mandiri.

Dalam konteks Indonesia, keempat variabel dalam kerangka *Balance of Threat* dapat ditelaah secara konkret. Pertama, pada aspek *aggregate power*, Republik Rakyat Tiongkok memiliki keunggulan yang cukup mencolok dalam kapasitas ekonomi maupun militer dibandingkan Indonesia, sehingga secara objektif menempati posisi sebagai kekuatan dominan di kawasan. Namun demikian, variabel ini tidak bersifat tunggal dalam menentukan respons strategis suatu negara.

Kedua, faktor *geographic proximity* menjadi sangat krusial, khususnya dalam konteks Laut Natuna Utara. Kedekatan geografis antara wilayah klaim Republik Rakyat Tiongkok dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia meningkatkan sensitivitas terhadap potensi ancaman. Hal ini semakin diperkuat oleh kehadiran rutin kapal China Coast Guard serta armada milisi maritim yang beroperasi secara reguler di kawasan tersebut.

Ketiga, pada dimensi *offensive capability*, modernisasi militer Republik Rakyat Tiongkok khususnya penguatan angkatan laut People's Liberation Army Navy (PLAN) telah meningkatkan kemampuan proyeksi kekuatan di kawasan. Kehadiran kapal perang modern, pengembangan sistem *anti-access/area denial* (A2/AD), serta pembangunan fasilitas militer di Laut Tiongkok Selatan mencerminkan peningkatan kapasitas ofensif yang semakin signifikan.

Keempat, dimensi *aggressive intentions* tercermin dari konsistensi klaim sepihak melalui *Nine-Dash Line* oleh Republik Rakyat Tiongkok serta berbagai aktivitas yang bersinggungan dengan ZEE Indonesia di kawasan Laut Natuna Utara. Meskipun Tiongkok secara resmi mengedepankan narasi kebijakan damai, praktik di lapangan justru membentuk persepsi adanya ancaman laten di kalangan pembuat kebijakan Indonesia.

Berdasarkan keempat variabel tersebut, Indonesia cenderung mengadopsi pendekatan *hedging* dan *soft balancing*, yakni memperkuat kapabilitas pertahanan domestik tanpa secara eksplisit berpihak pada blok kekuatan tertentu.

Meskipun kerangka konseptual *Balance of Threat* sangat relevan untuk menjelaskan postur strategis Indonesia, tantangan utama dalam kajian studi strategis dan pertahanan terletak pada bagaimana mengoperasionalkan serta mengukur variabel-variabel ancaman tersebut secara sistematis. Persepsi ancaman dan penentuan respons strategis tidak cukup hanya bertumpu pada analisis deskriptif-kualitatif, karena pendekatan tersebut rentan terhadap bias subjektif dalam interpretasi. Oleh karena itu, memahami strategi pertahanan menuntut upaya untuk mengurai dan mengidentifikasi prioritas yang menjadi pertimbangan para pengambil kebijakan.

Menganalisis bobot ancaman di Asia Tenggara memerlukan pendekatan yang lebih kokoh, sistematis, dan terukur. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, penelitian ini akan menggunakan pendekatan *mixed-method* dengan mengadopsi instrumen *Analytic Hierarchy Process* (AHP) yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty.

Metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) dikembangkan oleh Thomas L. Saaty pada tahun 1970-an sebagai alat bantu pengambilan keputusan kompleks berbasis multikriteria. AHP awalnya digunakan dalam konteks militer oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, sebelum berkembang luas dalam bidang kebijakan publik, manajemen strategis, dan analisis risiko. Metode ini memungkinkan pengambilan keputusan yang sistematis melalui struktur hierarki dan perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*), sehingga mampu mengkuantifikasi preferensi subjektif menjadi bobot numerik yang konsisten secara logis.

Penggunaan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) dalam menganalisis *Balance of Threat* merupakan kebaruan metodologis yang signifikan dalam penelitian ini. Pendekatan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty tersebut memungkinkan peneliti mengurai persoalan pengambilan keputusan yang kompleks ke dalam struktur hierarkis yang logis dan sistematis. Dalam konteks ini, AHP akan dimanfaatkan untuk melakukan pembobotan serta kalkulasi kuantitatif terhadap empat kriteria *Balance of Threat* yang dirumuskan oleh Stephen M. Walt.

Melalui metode ini, penelitian dapat mengukur secara lebih empiris bagaimana persepsi para pakar pertahanan atau pengambil kebijakan di Indonesia dalam menilai tingkat kepentingan relatif antar variabel. Sebagai ilustrasi, AHP dapat digunakan untuk membandingkan bobot *geographic proximity* (misalnya keberadaan pangkalan militer asing di negara sekitar) dengan *aggressive intentions* (seperti pelanggaran wilayah maritim), sehingga menghasilkan prioritas yang lebih terukur dalam perumusan strategi pertahanan.

Kajian-kajian sebelumnya mengenai strategi pertahanan Indonesia di kawasan Asia Tenggara umumnya masih didominasi oleh pendekatan kualitatif, baik yang berbasis historis maupun yang berangkat dari perspektif institusionalisme dengan penekanan pada peran ASEAN. Sejumlah studi yang mengadopsi kerangka *Balance of Threat* juga cenderung berhenti pada analisis naratif terhadap dokumen kebijakan luar negeri, tanpa mengembangkan model pengukuran yang mampu menjelaskan secara lebih sistematis bagaimana kalkulasi ancaman tersebut disusun.

Sejumlah studi terdahulu menunjukkan dominasi pendekatan kualitatif dalam menganalisis strategi pertahanan Indonesia. Namun demikian, sebagian besar kajian tersebut belum mengintegrasikan pendekatan kuantitatif untuk mengukur persepsi ancaman secara sistematis. Penerapan kerangka *Balance of Threat* juga umumnya masih bersifat deskriptif, tanpa disertai operasionalisasi variabel yang dapat diukur secara empiris. Oleh karena itu, terdapat *research gap* yang jelas dalam upaya mengombinasikan pendekatan teoretis *Balance of Threat* sebagaimana dikembangkan oleh Stephen M. Walt dengan metode kuantitatif seperti *Analytic Hierarchy Process* (AHP) yang diperkenalkan oleh Thomas L. Saaty, guna menghasilkan analisis yang lebih terstruktur, terukur, dan berbasis empiris.

Di tengah transisi strategis pemerintahan saat ini, ketika Indonesia mendorong penguatan postur pertahanan yang lebih modern dalam kerangka cetak biru jangka panjang, pemahaman terhadap bobot ancaman eksternal menjadi semakin krusial. Oleh karena itu, penggabungan antara kerangka teoretis *balancing of threat* yang dikembangkan oleh Stephen M. Walt dengan instrumen pengukuran matematis-kualitatif seperti *Analytic Hierarchy Process* (AHP) dari Thomas L. Saaty menjadi sangat diperlukan. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi yang lebih kritis terhadap validitas, rasionalitas, serta keberlanjutan strategi pertahanan non-aliansi yang diadopsi Indonesia.

Oleh karena itu, ditengah tatanan dunia yang anarki dan keadaan dinamika global yang fluktuatif, banyak negara-negara kawasan asia Tenggara membangun pertahanan dengan bergabung dengan blok besar untuk mengantisipasi ancaman eksternal, sedangkan Indonesia masih mempertahankan warisan leluhur terkait pertahanan khususnya militer dengan memegang teguh politik luar negri bebas aktif (*non-alignment*), Berdasarkan keseluruhan uraian yang telah dipaparkan, penulis berupaya melakukan penelitian akademik yang mendalam, sistematis, dan terukur dengan mengangkat judul skripsi: **“Analisis Strategi Non-**

Alignment Indonesia Dalam Mejaga Pertahanan Indonesia Terhadap Dinamika Keamanan Kawasan Asia Tenggara ditinjau dengan Balance of Threat”

1.2 Pertanyaan Penelitian

Mengacu pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi dinamika keamanan Asia Tenggara mempengaruhi persepsi ancaman (tradisional) terhadap pertahanan Indonesia melalui *Balance of Threat*?
2. Bagaimana pengukuran tingkat potensi ancaman terhadap Indonesia berdasarkan empat variable *Balance of Threat* (BoT) yang elaborasikan dengan AHP?

1.3 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan secara lebih terfokus, mendalam, dan komprehensif, serta untuk mencegah meluasnya pembahasan di luar pokok permasalahan, maka ruang lingkup dan batasan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1.3.1 Fokus kajian

Penelitian ini secara substansial dibatasi pada evaluasi postur “Kebijakan non-alignment” Indonesia. Analisis terhadap perilaku dan respons strategis negara akan difokuskan secara eksklusif menggunakan kerangka *Balance of Threat* yang dikembangkan oleh Stephen M. Walt. Oleh karena itu, pembahasan diarahkan pada identifikasi serta pengukuran empat variabel utama pembentuk persepsi ancaman, yakni *aggregate power*, *geographic proximity*, *offensive capability*, dan *aggressive intentions* dari aktor-aktor dominan di kawasan. Penelitian ini tidak akan mengulas secara mendalam aspek ekonomi-politik, kecuali pada bagian yang memiliki keterkaitan langsung dengan kapabilitas pertahanan.

1.3.2 Geografis

Secara geografis, ruang lingkup penelitian ini mencakup kawasan Asia Tenggara dengan Indonesia sebagai aktor utama dalam analisis. Untuk memperkuat bukti empiris, penelitian ini akan memfokuskan pada skala ketegangan yang berdampak langsung terhadap strategi keamanan nasional, khususnya dinamika militerisasi di kawasan Asia Tenggara, serta implikasinya terhadap stabilitas kawasan dan sentralitas ASEAN.

1.3.3 Batasan Waktu

Penelitian ini memusatkan analisis pada periode kebijakan luar negeri dan pertahanan kontemporer, dengan penekanan khusus pada dinamika strategis di era transisi antara

kepemimpinan Jokowi Widodo & Prabowo Subianto. Pemilihan rentang waktu ini didasarkan pada signifikansinya, yakni ditandai oleh percepatan modernisasi postur pertahanan, penyesuaian strategi penangkalan, serta intensifikasi diplomasi pertahanan yang semakin proaktif di tengah meningkatnya rivalitas antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis strategi pertahanan Indonesia *non-alignment* Indonesia dalam merespon dinamika keamanan kawasan Asia Tenggara di tengah meningkatnya kekuatan besar.
2. Mengidentifikasi serta mengukur tingkat potensi ancaman terhadap Indonesia berdasarkan empat variabel dalam kerangka *Balance of Threat*, mulai dari *aggregate power*, *geographic proximity*, *offensive capability*, dan *aggressive intentions*.
3. Mengevaluasi sejauh mana strategi *non-alignment* mampu menjaga keseimbangan kawasan serta melindungi kepentingan nasional dalam konteks keamanan kontemporer.

1.4.2 Kegunaan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis
 - a. Memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian disiplin ilmu Hubungan Internasional, khususnya dalam studi keamanan internasional.
 - b. Memperbanyak literatur mengenai penggunaan teori *balance of threat* dengan pendekatan yang lebih empiris dan terukur melalui metode campuran.
 - c. Menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji strategi pertahanan non-blok, terutama dalam konteks kawasan Asia Tenggara.
 - d. Mengisi *research-gap* dengan menghadirkan kombinasi metode campuran dalam mengukur potensi ancaman secara sistematis.
2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan masukan terhadap pembuat kebijakan (*policy makers*), khususnya di bidang pertahanan dan keamanan, dalam memutuskan strategi yang tepat terhadap dinamika keamanan kawasan.
- b. Menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pertahanan Indonesia
- c. Memberikan gambaran strategis bagi institusi pertahanan mengenai skala prioritas ancaman yang perlu diantisipasi
- d. Mendukung upaya penguatan posisi Indonesia sebagai aktor penyeimbang (*balancer*) dalam menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara.

1.5 Kerangka Teoritis

1.5.1 Balance of Threat

Teori *Balance of Threat* merupakan kerangka analitik yang dikembangkan oleh Stephen M. Walt dalam karya monumentalnya, *The Origins of Alliances* (1987). Walt mengajukan kritik mendasar terhadap teori *Balance of Power* klasik yang dirumuskan oleh Kenneth Waltz (1979), yang berargumen bahwa negara-negara cenderung membentuk aliansi sebagai respons terhadap akumulasi kekuatan material (*power*) dari negara lain. Walt berpendapat bahwa logika tersebut tidak cukup presisi untuk menjelaskan perilaku aliansi di dunia nyata, karena negara tidak serta-merta merespons besarnya kekuatan, melainkan lebih merespons tingkat *ancaman* yang dipersepsikan (Walt, 1987).

Menurut Walt (1987), persepsi ancaman suatu negara ditentukan oleh interaksi empat variabel independen, yaitu: (1) *Aggregate Power*, yang merujuk pada total kapabilitas material sebuah negara mencakup populasi, kapasitas ekonomi, dan kekuatan militer; (2) *Geographic Proximity*, yaitu tingkat ancaman yang cenderung meningkat seiring dengan kedekatan geografis antara negara sumber ancaman dengan negara yang terancam; (3) *Offensive Capability*, yakni kemampuan suatu negara untuk melancarkan serangan dan memproyeksikan kekuatannya secara ofensif; serta (4) *Aggressive Intentions*, yaitu persepsi mengenai niat atau maksud agresif yang dipersepsikan dari suatu negara terhadap negara lain. Walt menegaskan bahwa “states ally against the state that poses the greatest threat” (Walt, 1987, hlm. 21–26), yang berarti motivasi pembentukan aliansi bersifat responsif terhadap persepsi ancaman, bukan sekadar distribusi kekuatan material.

Lebih lanjut, Walt membedakan dua respons strategis utama yang dapat dipilih negara dalam menghadapi ancaman. Pertama, *balancing*, yaitu bersekutu dengan pihak yang lebih lemah untuk mengimbangi ancaman dari kekuatan yang lebih besar (eksternal) atau

memperkuat militer dan alusista dengan tujuan *balancing power* atau menyeimbangkan kekuatan. Kedua, *bandwagoning*, yaitu bergabung dengan pihak yang mengancam demi memperoleh jaminan keamanan atau keuntungan lainnya. Walt berargumen bahwa negara-negara umumnya lebih memilih strategi *balancing* daripada *bandwagoning*, karena bergabung dengan kekuatan yang mengancam justru akan meningkatkan kerentanan negara tersebut dalam jangka panjang (Walt, 1987).

Definisi terkait *balance of threat* diperkuat oleh Glenn H. Snyder yang menyatakan bahwa aliansi terbentuk berdasarkan persepsi ancaman kolektif, bukan sekedar distribusi kekuatan (Weitsman & Snyder, 1998). Sementara itu, J. Mearsheimer melihat bahwa negara akan merespon ancaman secara rasional dengan mempertimbangkan kekuatan lain dalam sistem anarki (Mearsheimer, 2001)

Selanjutnya, Randall L. Schweller mengkritik terkait tidak semua negara yang melakukan *balancing* terhadap ancaman, ada pun yang melakukan *bandwagoning* untuk keuntungan tertentu, jika negara tersebut bersifat revisionist (Schweller, 1994). Sedangkan Kai He menambahkan bahwa persepsi ancaman juga dipengaruhi oleh faktor psikologis dan persepsi elite, bukan hanya *variable material* (He & Feng, 2012)

Dalam konteks penelitian ini, kerangka *Balance of Threat* digunakan untuk menganalisis mengapa Indonesia tidak bergabung dalam aliansi militer formal meskipun dihadapkan pada kebangkitan kekuatan Tiongkok yang signifikan dan negara-negara yang memiliki konflik kepentingan di kawasan Asia Tenggara. Dengan mengoperasionalkan keempat variabel ancaman Walt melalui metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP), penelitian ini berupaya mengukur secara lebih sistematis dan empiris bagaimana para pembuat kebijakan pertahanan Indonesia mempersepsikan tingkat ancaman dari aktor-aktor strategis di kawasan.

Dengan demikian, teori *balance of threat* dalam penelitian ini digunakan untuk melihat bagaimana Indonesia mempersepsikan tingkat ancaman dari aktor-aktor strategis di kawasan Asia Tenggara dan bagaimana persepsi tersebut dapat mempengaruhi kebijakan pertahanan.

1.5.2 Soft Balancing

Konsep *soft balancing* diperkenalkan oleh Robert Pape (2005) dan dikembangkan lebih lanjut oleh T.V. Paul (2005) sebagai respons konseptual terhadap fenomena pasca-Perang Dingin, di mana negara-negara cenderung menghindari konfrontasi langsung atau pembentukan aliansi militer formal terhadap kekuatan dominan, namun tetap berupaya membatasi dan mengelola pengaruh kekuatan tersebut melalui cara-cara non-militer. Pape

mendefinisikan *soft balancing* sebagai penggunaan institusi internasional, diplomasi ekonomi, dan koordinasi taktis untuk menghambat unilateralisme kekuatan dominan tanpa harus melakukan perlombaan senjata (Pape, 2005).

T.V. Paul (2005) dalam karyanya “Soft Balancing in the Age of U.S. Primacy” menjabarkan instrumen-instrumen utama yang digunakan dalam strategi ini, meliputi ententes diplomatik, pembangunan kapabilitas yang bersifat laten, dan koordinasi melalui institusi multilateral. Paul berargumen bahwa dalam era unipolaritas atau dominasi hegemon, negara-negara menengah dan kecil lebih memilih strategi *soft balancing* karena risiko kontraproduktif dari *hard balancing* terlalu besar dan mahal (Paul, 2005). Lebih lanjut, Pape menegaskan bahwa *soft balancing* bukan berarti pasif, melainkan merupakan strategi aktif yang diperhitungkan secara matang untuk memelihara otonomi kebijakan luar negeri dan mengurangi ketergantungan pada satu kekuatan besar tertentu.

Stephen G. Brooks dan William C. Wohlforth mengkritik konsep ini dengan menyatakan bahwa *soft balancing* seringkali memiliki dampak terbatas dalam benar-benar mengimbangi kekuatan hegemon, karena tidak melibatkan peningkatan kekuatan militer secara signifikan (G. Brooks & Wohlforth, 2005). Namun demikian, kritik ini justru menegaskan bahwa *soft balancing* lebih bersifat strategi restriktif daripada konfrontatif.

Dalam konteks penelitian ini, konsep *soft balancing* sangat relevan untuk menjelaskan perilaku strategis Indonesia di tengah panasnya dinamika keamanan Asia Tenggara. Strategi pertahanan Indonesia yang mengandalkan diplomasi pertahanan *omni-directional*, partisipasi aktif dalam mekanisme ADMM dan ADMM-Plus, serta penolakan terhadap pakta militer formal mencerminkan karakteristik klasik dari *soft balancing*. Indonesia secara bersamaan menjalin kemitraan strategis dengan AS, Tiongkok, Australia, Jepang, dan Rusia tanpa terikat secara eksklusif pada salah satunya, sebuah pola yang oleh Pape disebut sebagai “diplomatic ententes” yang terkoordinasi.

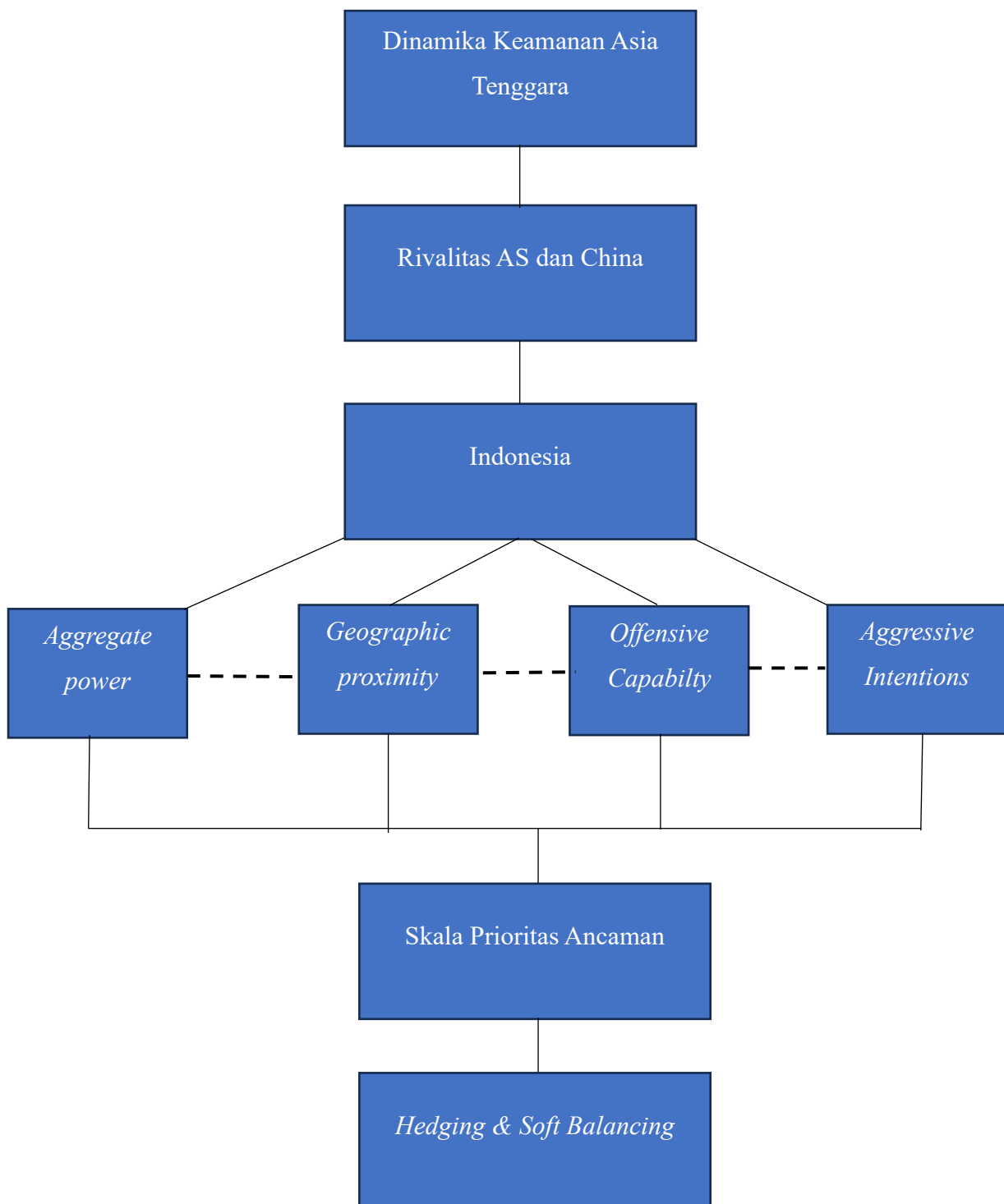
Dengan demikian, *soft balancing* berfungsi untuk melihat bagaimana Indonesia membatasi dan mengelola pengaruh kekuatan besar di kawasan Asia Tenggara melalui instrumen non-militer, sekaligus mempertahankan otonomi strategis dalam kerangka kebijakan non-alignmnet.

1.6 Asumsi Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan kerangka konseptual, penelitian ini memiliki asumsi sebagai berikut:

1. Dinamika keamanan dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara secara fundamental dibentuk dan dipengaruhi oleh rivalitas antara kekuatan besar (*great power*), khususnya antara China dan Amerika Serikat. Hal ini secara langsung maupun tidak langsung menciptakan ancaman multidimensional bagi negara-negara kawasan khususnya Indonesia.
2. Nilai-nilai kualitatif dapat diuraikan, dikuantifikasi, dan diukur secara sistematis dan empiris, meskipun prioritas dan penilaian bobot ancaman dari aktor strategis rumit dan dipengaruhi oleh bias persepsi. Alat Analytic Hierarchy Process (AHP) dapat digunakan untuk melakukan pengukuran ini secara konsisten dan logis. Dan memberikan pilihan atau *decision making* yang strategis kedepannya.

1.7 Kerangka Analisis



Gambar 1 2 Framework Analysis